



Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/Kota Penerima Opini WTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2022

Dita Marsella¹, Ari Agung Nugroho², Nurwasya³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 25, 2024
Revised May 30, 2024
Accepted June 7, 2024

Kata Kunci:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah,
Rasio Efektifitas PAD,

Keywords:

Regional Financial Performance,
Regional Fiscal Capacity Ratio,
PAD Effectiveness Ratio

ABSTRAK

Mengetahui seberapa baik kinerja keuangan Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2018 hingga 2022 menjadi tujuan utama penelitian ini. Teknik deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Studi ini menggunakan berbagai kriteria efisiensi keuangan, kapasitas fiskal, efektivitas, pertumbuhan, keselarasan, dan kemandirian keuangan daerah. Dari tahun 2018 hingga 2022, rata-rata Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah masing-masing sebesar 22,512%, 16,202%, dan 10,636%. Ketiga kabupaten tersebut masih berada pada kelompok sangat rendah. Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang menduduki peringkat miskin menurut rasio kapasitas fiskal daerah, sedangkan Kabupaten Bangka Tengah menduduki peringkat sangat rendah. Dengan skor rata-rata masing-masing sebesar 106,982% dan 118,842%, rasio efektivitas PAD dinilai Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka sangat efektif. Namun Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan efikasi dengan rata-rata 94,402%. Kapasitas keuangan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang masih belum efisien dibandingkan rata-rata nasional. Kabupaten Bangka memiliki rasio pertumbuhan yang positif, sedangkan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang memiliki rasio pertumbuhan yang negatif. Terdapat ketimpangan dimana belanja operasional lebih diprioritaskan dibandingkan investasi modal, menurut Rasio Harmoni untuk Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Bangka Tengah.

ABSTRACT

Finding out how well Pangkalpinang City, Bangka Regency, and Central Bangka Regency did financially from 2018 to 2022 is the main goal of this study. The quantitative descriptive technique was used in this study, with secondary data serving as the main source of information. The study employs a variety of financial efficiency, fiscal capacity, effectiveness, growth, alignment, and regional financial independence criteria. From 2018 to 2022, the averages for Pangkalpinang City, Bangka Regency, and Central Bangka Regency were 22.512%, 16.202%, and 10.636%, respectively, according to the study. All three regencies remained in the extremely low group. Bangka Regency and Pangkalpinang City are ranked poor according to the regional fiscal capacity ratio, whereas Central Bangka Regency is ranked extremely low. With an average score of 106.982% and 118.842%, respectively, the PAD effectiveness ratio deems Pangkalpinang City and Bangka Regency as very effective.

Central Bangka Regency, however, demonstrated its efficacy with a mean of 94.402%. Financial capacity in Bangka Regency, Central Bangka Regency, and Pangkalpinang City is still inefficient relative to the national average. Bangka Regency had a positive growth ratio, whilst Central Bangka Regency and Pangkalpinang City had negative ones. Inequality exists, with operating spending given more priority than capital investment, according to the Harmony Ratio for Bangka Regency, Pangkalpinang City, and Central Bangka Regency.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Dita Marsella

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung,
Bangka Belitung, Indonesia
Email: ditamarsella02@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi diperlukan demi terwujudnya otonomi daerah yang efektif, transparan, dan efisien serta dapat bertanggungjawab kepada masyarakat luas [1]. Untuk memulihkan dan mengevaluasi kinerja, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan skema tugas dan cara penerapannya. Selain itu, evaluasi kinerja membantu membentuk upaya masa depan untuk menjadikan pemerintah kota lebih efisien. Salah satu cara untuk mengukur kesehatan keuangan suatu pemerintah daerah adalah dengan menggunakan rasio keselarasan, namun metrik lain yang bermanfaat antara lain adalah rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio kapasitas fiskal daerah. Dalam upaya mempercepat pemenuhan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah otonom besar dalam upaya meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Provinsi kepulauan Bangka Belitung muncul pada masa otonomi daerah [2]. Idenya adalah agar provinsi dapat bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah federal dan menangani anggaran daerah secara efektif. Berikut rincian pendapatan daerah yang diterima Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2022 (Dalam Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	1.095	1.259	1.136,65	1.181,67	1.325,55
Belitung	963	1.083	957,02	1.016,17	1.107,84
Pangkal Pinang	916	916	843,38	948,31	1.010,52
Bangka Selatan	866	941	743,80	948,31	1.027,15
Bangka Tengah	890	935	906,78	896,01	934,89
Bangka Barat	867	914	827,32	879,87	965,91
Belitung Timur	824	887	776,51	846,32	918,61

Pada tahun 2018 hingga tahun 2022, realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahunnya bervariasi, seperti terlihat pada tabel di atas. Sasaran realisasi pendapatan daerah tersebut terlampaui oleh lima (lima) pemerintah daerah. Kota Pangkalpinang (102,84%), Kabupaten Bangka Tengah (107,04%), Kabupaten Bangka Barat (106,45%) dan Kabupaten Belitung Timur (100,93%) termasuk dalam kabupaten ini. Kabupaten Bangka menyumbang 104,70%. Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang secara konsisten mencapai tujuan tersebut pada tahun 2018 hingga 2022.

Pada waktu yang sama, banyak kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dianugerahi penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Bangka merupakan kawasan perkotaan ini. Secara resmi, opini BPK merupakan penilaian auditor atau profesional mengenai sesuai atau tidaknya data laporan keuangan dari segi keterbukaan, kepatuhan hukum, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, dan kewajaran pengungkapan, sebagaimana tercantum dalam situs BPK RI.

Dengan menggunakan berbagai pendekatan, beberapa peneliti telah melihat pentingnya mengukur keberhasilan finansial dalam penelitian regional. Kinerja keuangan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2014–2018 diteliti oleh Gayatrina Oktalina (2020). Penelitian ini merinci kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2014–2018 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 7,10% sebagai metrik pilihan. Hal ini berjalan cukup baik, dengan rasio efisiensi regional sebesar 111,12%. Dengan nilai sebesar 40,00% maka rasio keuangan daerah sangat wajar. Selain itu, Nizwan Zuhri [2] menghitung angka-angka untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melihat seberapa baik kinerja keuangannya. Berdasarkan temuan tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat kemampuan keuangan yang sangat rendah jika mempertimbangkan kemنديannya. Dari sisi desentralisasi fiskal masuk dalam kategori sedang-cukup, namun dari sisi ketergantungan daerah cukup tinggi. Topik ini menarik bagi peneliti karena aspek sejarah dan fenomenanya diuraikan dalam uraian permasalahan di bawah ini.

2. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghitung data keuangan yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono [3] merupakan pendekatan yang berbasis positivis dalam mempelajari sampel penelitian dan populasi. Dengan menggunakan teknik penelitian deskriptif, matematis atau lainnya, seseorang dapat membuat deskripsi. Penelitian yang menggunakan data numerik yang berasal dari situasi dunia nyata untuk mengkarakterisasi variabel dalam bentuk sebenarnya dikenal sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang tahun 2018–2022, serta rasio keuangan daerah seperti kapasitas fiskal daerah, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kemandirian keuangan daerah akan dikaji.

2.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Seluruh pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi

subjek penelitian ini. Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang menjadi tiga entitas yang menjadi sampel penelitian. Dipilih menggunakan strategi seleksi berbasis kriteria yang mengutamakan sifat-sifat yang diinginkan [3]. Kriteria berikut harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam proses ini:

1. Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima Opini WTP lima tahun berturut-turut periode 2018-2022.
2. menyajikan laporan realisasi anggaran yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Data numerik atau yang direpresentasikan secara statistik, yang dikenal sebagai data kuantitatif, digunakan dalam penelitian ini. Informasi kuantitatif penelitian ini bersumber dari sumber sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2022.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini berasal dari kombinasi metode dokumentasi dan wawancara. Data penelitian diisi dengan menggunakan sumber sekunder seperti laporan realisasi anggaran dan wawancara yang dilakukan untuk memverifikasi data.

2.5 Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari analisis keuangan daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, seperti yang melihat pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, keselarasan, kapasitas fiskal, kemandirian, dan keuangan daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

$$KFD_{\text{kabupaten/kota-i}} = \frac{[\text{pendapatan} + \text{penerimaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]}{\text{Belanja Pegawai}_{\text{kabupaten/kota-i}}}$$

$$RKFD_{\text{kabupaten/kota-i}} = \frac{KFD_{\text{kabupaten/kota-i}}}{\text{Belanja Pegawai}_{\text{kabupaten/kota-i}}}$$

3. Rasio Pertumbuhan

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

4. Rasio Efektivitas

$$\text{REKD} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Kecerassian

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

2.6 Tinjauan Pustaka

2.6.1 Teori Keagenan

Konsep keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Kekuasaan untuk membuat pilihan tertentu diberikan kepada agen melalui kontrak prinsipal-agen [4]. Selanjutnya, teori keagenan dapat digunakan oleh sektor publik. Pemerintah pusat dan daerah di negara demokratis, atau masyarakat dan pemerintah, mempunyai hubungan kelembagaan yang sama. Pemerintah federal telah mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan tingkat negara bagian dan lokal. Pemerintah federal harus meminta pertanggungjawaban berbagai pemerintah daerah. Meski demikian, kesejahteraan juga harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Perencanaan anggaran sektor publik juga merupakan cerminan hubungan dengan pihak berwenang. Prosesnya dimulai dari pemerintah daerah menyiapkan anggaran, yang kemudian diserahkan ke Pusat untuk mendapat persetujuan. Dana yang dialokasikan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program.

2.6.2 Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian yang mengukur perkembangan suatu perusahaan dalam menjalankan kewajibannya secara efektif dan akurat inilah yang mengarah pada kesuksesan finansial, menurut Fahmi [5]. Sementara itu, kinerja keuangan didefinisikan oleh Makatita [6] sebagai upaya formal organisasi untuk menilai keberhasilannya dalam menciptakan keuntungan. Hal ini membantu organisasi untuk melihat ke mana arahnya dan bagaimana organisasi dapat memperbaikinya dengan memanfaatkan sumber dayanya secara lebih baik. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah sepanjang suatu periode anggaran dalam memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang dituangkan dalam undang-undang disebut dengan kinerja keuangan daerah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini memungkinkan untuk menilai efisiensi pemerintah daerah dalam menangani anggaran daerah

2.6.3 Rasio Kecerassian

Persentase ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup berhati-hati dalam membagi anggaran antara pengeluaran sehari-hari dan investasi di bidang infrastruktur. Kemungkinan penurunan porsi dana pembangunan yang ditujukan untuk infrastruktur perekonomian masyarakat semakin besar seiring dengan meningkatnya alokasi belanja harian [7].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 5 Perhitungan RKKD Pemerintah Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Bangka	Bangka Tengah	Pangkalpinang
2018	18,78%	9,62%	22,33%
2019	13,45%	10,84%	21,00%
2020	16,61%	10,78%	20,82%
2021	15,61%	10,25%	22,40%
2022	16,56%	11,69%	26,01%

Tabel berikut menampilkan hasil penghitungan RKKD tahun anggaran 2018–2022. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Pangkalpinang tergolong Sangat Rendah, dan pola hubungannya termasuk dalam skala hubungan instruktif yaitu berkisar antara 0% sampai dengan 25%. Pemerintah daerah belum mampu secara finansial untuk melaksanakan otonomi tersebut, sehingga pemerintah pusat mempunyai peran yang lebih mendominasi atau berkuasa dalam pemerintahannya, seperti terlihat pada tabel. Perubahan yang terjadi hanya pada bentuk interaksi yang lebih konsultatif di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022.

3.2 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Tabel 6 Perhitungan RKFD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Indeks KFD	Katagori KFD
2018	0,780	Sedang
2019	0,602	Rendah
2020	0,359	Sangat Rendah
2021	0,601	Rendah
2022	1,551	Sedang

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2021, kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bangka tergolong buruk menurut RKFD pemerintah Kabupaten Bangka tahun anggaran 2018-2022. Sedangkan untuk kemampuan keuangan daerah pada tahun 2018 dan 2019 tergolong sedang. Kategori 2020 memiliki skor yang rendah.

Tabel 7. Perhitungan RKFD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Indeks KFD	Katagori KFD
2018	0,536	Sangat Rendah
2019	0,462	Sangat Rendah
2020	0,466	Sangat Rendah
2021	0,599	Rendah
2022	1,284	Rendah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam tahun anggaran 2018-2022 dominan sangat rendah. Dilihat dari RKFD Kabupaten Bangka Tengah dikategorikan sangat rendah selama 3 tahun berturut-turut 2018-2020. Pada tahun 2021-2022 Kabupaten Bangka Tengah dikategorikan rendah.

Tabel 8. Perhitungan RKFD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Indeks KFD	Katagori KFD
2018	0,642	Rendah
2019	0,507	Sangat Rendah
2020	0,774	Sedang
2021	0,651	Rendah
2022	1,420	Rendah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Pangkalpinang dalam tahun anggaran 2018-2021 cenderung rendah. Dilihat dari RKFD Kota Pangkalpinang dikatagorikan rendah selama 3 tahun yakni pada tahun 2018, 2021 dan 2022.

3.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 9 Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Bangka	Bangka Tengah	Pangkalpinang
2018	122,88%	99,62%	102,53%
2019	108,52%	106,59%	108,41%
2020	115,94%	87,89%	89,12%
2021	114,21%	81,40%	122,88%
2022	130,81%	96,51%	111,97%

Dari data pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Bangka dan Pangkalpinang pada tahun anggaran 2018–2022 mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka menunjukkan kemampuan keuangan yang sangat efektif dengan rasio efektivitas > 100%. Namun dengan imbal hasil yang hanya 89,12% pada tahun 2020, kemampuan finansial Pangkalpinang terbukti tidak efektif. Tabel tersebut menampilkan hasil penilaian rasio efektif Kabupaten Bangka Tengah. Persentasenya mencapai 106,59 pada tahun 2019 yang dinilai sangat efektif. Temuan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah berbeda-beda. Sementara 87,89% dan 81,40% dianggap kurang berhasil pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan 99,62% dan 96,51% dianggap sangat efektif pada tahun 2018 dan 2022.

3.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 10 Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Bangka	Bangka Tengah	Pangkalpinang
2018	98,01%	97,66%	96,51%
2019	98,71%	96,92%	104,18%
2020	101,41%	100,19%	105,24%
2021	99,22%	97,38%	95,23%
2022	98,06%	95,96%	97,25%

Rasio efisiensi tahun anggaran 2018–2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah melakukan pemborosan uang, berdasarkan perkiraan tabel. Hal ini terlihat pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2022. Temuan perhitungan rasio efisiensi berada pada rentang wilayah 90%-100%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah kurang efisien. Sebaliknya, pada tahun 2020 memiliki rating inefisiensi sebesar 101,41%. Sementara itu, kemampuan keuangan Kota Pangkalpinang dinilai kurang efisien jika melihat rasio efisiensinya. Pada tahun 2018, 2021, dan 2022 hal ini akan terlihat. Karena rasio efisiensi yang dihitung berkisar antara 90% hingga 100%, maka kapasitas keuangan Kota Pangkalpinang dinilai kurang efisien. Karena rasio efisiensi keuangan Kota Pangkalpinang lebih tinggi dari 100% baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan kota tersebut tidak efisien.

3.5 Rasio Pertumbuhan

Tabel 11. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan TPD	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi
2018	-11,74%	-2,84%	-51,33%	12,46%
2019	-16,40%	15,01%	79,33%	8,57%
2020	7,65%	-9,71%	-29,54%	-3,16%
2021	-1,13%	3,96%	39,17%	-4,15%
2022	21,12%	12,18%	25,41%	9,50%

Dari data pada tabel 11 dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan Kabupaten Bangka pada tahun anggaran 2018–2022 mengalami variasi baik secara absolut maupun kenaikan relatif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah (TPD), Belanja Modal, dan Belanja Operasional. Tabel tersebut menunjukkan bahwa beban operasional mengalami penurunan sedangkan PAD, TPD, dan belanja modal mengalami peningkatan. Dengan demikian, Kabupaten Bangka berkembang ke arah yang menguntungkan.

Tabel 12 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2018-2022 (Dalam Persentase).

Tahun	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan TPD	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi
2018	-21,96%	14,95%	43,42%	5,00%
2019	16,91%	5,02%	-17,49%	9,21%
2020	-4,10%	-3,03%	-16,83%	2,53%
2021	-2,21%	-1,19%	-12,20%	-0,07%
2022	16,81%	4,34%	5,62%	3,36%

Gambar pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2018–2022 Kabupaten Bangka Tengah terdapat variasi persentase hasil perhitungan rasio pertumbuhan yang memperhitungkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah (TPD), Belanja Modal, dan Belanja Operasional. Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan PAD meningkat, TPD, belanja modal, dan belanja operasional semuanya mengalami penurunan, dan hanya belanja operasional yang mengalami peningkatan substansial. Boleh dikatakan Kabupaten Bangka Tengah mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 13. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2022 (Dalam Persentase)

Tahun	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan TPD	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi
2018	-3,92%	5,43%	-9,28%	16,03%
2019	-7,19%	0,09%	10,22%	-7,12%
2020	-9,12%	-7,97%	-35,17%	16,58%
2021	19,79%	12,44%	15,59%	0,80%
2022	19,61%	6,56%	3,36%	10,27%

Tabel perhitungan menunjukkan bahwa persentase rasio pertumbuhan Pemkot Pangkalpinang tahun anggaran 2018–2022 mengalami fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah (TPD), Belanja Modal (CE), dan Belanja Operasional (OPE). Tabel ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 2020, dan 2022, beban operasional meningkat sedangkan PAD, TPD, dan belanja modal mengalami penurunan pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan Pangkalpinang pada tahun 2018 hingga 2022 bisa dikatakan negatif.

3.6 Rasio Kecerassian

Tabel 14. Perhitungan Rasio Kecerassian Pemerintah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Bangka		Bangka Tengah		Pangkalpinang	
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
2018	78,71%	9,86%	66,50%	22,05%	74,11%	25,79%
2019	73,77%	15,26%	69,68%	17,46%	63,71%	26,30%
2020	77,01%	11,59%	71,28%	14,48%	79,89%	18,34%
2021	72,57%	15,86%	74,16%	13,24%	79,14%	20,84%
2022	71,67%	17,94%	74,55%	13,60%	80,20%	19,79%

Dari sisi rasio kesesuaian, terlihat jelas bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang tidak seimbang, seperti terlihat pada tabel yang berisi temuan perhitungan. Rasio belanja modal rendah karena permintaan belanja operasional terus mendapatkan sebagian besar kas yang dimiliki.

4. KESIMPULAN

Kota Pangkalpinang mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun anggaran 2018–2022. Di sisi lain, Kabupaten Bangka Tengah berada dibawah Kabupaten Bangka. Pada skala 0% hingga 25%, pola hubungannya bersifat instruktif; Namun kinerja keuangan Kota Pangkalpinang sebesar 22,512%, Kabupaten Bangka sebesar 16,202%, dan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 10,636%, kemampuan kinerja semuanya masih sangat rendah.

Kinerja keuangan Kabupaten Bangka Tengah sangat rendah, sedangkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang tergolong rendah menurut Rasio Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah tahun anggaran 2018–2022.

Kabupaten Bangka mengungguli Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang dalam hal kinerja keuangan daerah menurut Rasio Efektivitas PAD tahun anggaran 2018–2022. Meskipun demikian, Kota Pangkal Pinang telah mengungguli daerah Bangka Tengah dalam hal kesuksesan finansial. Dengan rata-rata masing-masing sebesar 106,982% dan 118,842%, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka sama-sama berfungsi pada kapasitas keuangan sangat efektif. Rata-rata kompetensi keuangan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 94,402% termasuk dalam kategori sangat efektif.

Keempat, jika dilihat dari rasio efisiensi tahun anggaran 2018–2022, Kabupaten Bangka Tengah mengungguli Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dalam hal kinerja keuangan daerah. Kabupaten Bangka, bagaimanapun, telah mengungguli Kota Pangkalpinang dalam hal kesuksesan finansial. Meski demikian, pada skala 90% hingga 100%, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang masih berada di bawah rata-rata.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka tahun anggaran 2018–2022 ditunjukkan dengan rasio pertumbuhan yang menunjukkan pertumbuhan yang baik. Sementara itu, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah sama-sama menunjukkan pertumbuhan negatif. Terdapat disparitas antara rasio belanja operasional dan rasio belanja

modal pada saat mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangandining dengan menggunakan Rasio Keserasian tahun anggaran 2018-2022.

REFERENSI

- [1] Sinta, G., & Tumija. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 61–78. www.djpk.kemenkeu.go.id
- [2] Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.
- [3] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- [4] Zelmianti, O. R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *JRAK*, 7(1), 11–21.
- [5] Fahmi, I. (2014). *Analisis Laporan Keuangan* (D. Handi, Ed.; 1st ed.). ALFABETA
- [6] Makatita, R. F. (2016). Pentingnya Kinerja Keuangan Dalam Mengatasi Kesulitan Keuangan Perusahaan : Suatu Tinjauan Teoritis. *JOURNAL OF MANAGEMENT*, 2(1), 137–150.
- [7] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (E. S. Suharsi, Ed.; 4th ed.). Salemba Empat.